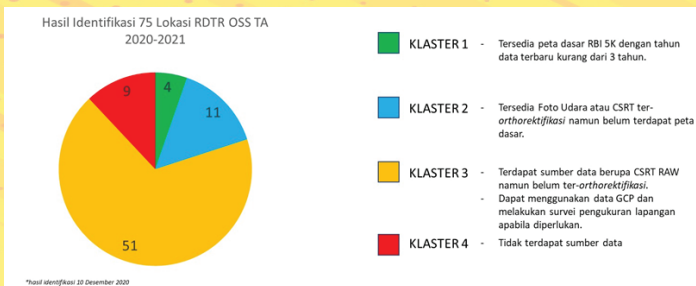


Kebijakan dan Isu Strategis: “KOORDINASI PERSIAPAN PERCEPATAN RDTR OSS TAHUN 2021”

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang pada tahun 2021 sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 75 RDTR. Pada awalnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengusulkan wilayah-wilayah yang akan dipercepat peningkatan investasinya di seluruh Indonesia. Salah satu kriterianya adalah daerah dengan realisasi investasi tertinggi selama tahun 2018 sampai 2019 berdasarkan data BKPM. Pada daerah-daerah tersebut perlu dipercepat penyelesaian penyusunan dan penetapan RDTR nya dalam rangka penyelenggaraan *Online Single Submission*. Pada daerah-daerah tersebut perlu disusun RDTR nya sebagai instrument pemberian izin investasi di daerah. Pada tahun 2018 Kemenko Perekonomian telah mengusulkan sebanyak 159 kabupaten/kota yang diprioritaskan penyusunan RDTR nya dalam rangka OSS. Kemudian tahun 2019 telah dipilih 56 RDTR pertama yang masuk program percepatan dan saat ini masih berproses dalam penetapan.



Untuk tahun 2021 ini berdasarkan usulan Kemenko Perekonomian maka Pemerintah memandang perlu dilaksanakan bantuan teknis percepatan penyusunan RDTR. Hal ini berdasarkan amanat PP no 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dimana pada pasal 44 disebutkan bahwa dalam rangka penetapan RDTR, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penataan ruang akan memberikan bantuan teknis. Berdasarkan amanat inilah maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang bekerjasama dengan BIG dan LAPAN, melakukan bantuan teknis pada daerah-daerah prioritas tersebut. BIG bertanggungjawab menyediakan peta dasar skala 1:5000 pada 75 wilayah tersebut berdasarkan citra terbaru yang disediakan oleh LAPAN.

Pada tanggal 12 November 2020 di Hotel Intercontinental Jakarta, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi pertama di tingkat Eselon 1 untuk membahas rencana pelaksanaan pekerjaan pemetaan RDTR

OSS ini. Pertemuan ini menyepakati bahwa BIG bertanggungjawab menyediakan peta dasar untuk kebutuhan penyusunan RDTR, serta bertugas mendampingi penyusunan peta tematik dan peta rencananya. Sedangkan LAPAN akan berusaha menyediakan citra satelit terkini pada wilayah RDTR OSS tersebut.

Pada Rapat Koordinasi kedua yang diadakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Hotel Mulia Jakarta, yang merupakan rapat tim teknis dalam mengaudit kebutuhan dan ketersediaan data spasial dasar, maka diperoleh gambaran umum kondisi data tersebut, agar dapat ditentukan Langkah-langkah selanjutnya. Tim teknis ini merupakan gabungan personil dari Kementerian ATR, BIG dan LAPAN.

Gambaran kondisi data spasial dasar tersebut sangat penting untuk merencanakan tahapan teknis selanjutnya, berdasarkan ketersediaan waktu yang terbatas. Diharapkan seluruh aspek perpetaan, baik peta dasar sampai peta rencana sudah dapat selesai pada Juni 2020, karena selanjutnya akan dilakukan proses legalisasi RDTR.

Hasil dari audit tim teknis tersebut kemudian dilaporkan kembali pada Rapat Koordinasi Eselon 1 yang diadakan pada tanggal 14 Desember 2020 di Hotel Mulia Jakarta. Dalam rapat tersebut dibahas kondisi umum dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Selanjutnya di internal BIG dilakukan pembagian tugas untuk penyelesaian teknis peta dasar ini. Untuk itu akan segera dibentuk tim teknis khusus yang anggotanya merupakan gabungan pusat-pusat di Kedeputan IGD dan IGT. Tim teknis akan segera mulai bekerja di awal Januari 2021 untuk menepati jadwal penyelesaian yang ditentukan. *[Ryan Pribadi, 2020]*



Focus Group Discussion(FGD) Penyusunan Atlas Bentang Sumberdaya Gunungapi

Pada Tanggal 16 November 2020 dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi Jawa Bagian Barat secara *online* yang dipimpin oleh Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik. FGD ini dihadiri oleh narasumber dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Kementerian ESDM dan Universitas Gadjah Mada. Pokok pembahasan FGD ini membahas tentang hasil pengumpulan data dari survei lapangan dan progres penyusunan Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi.

Survei lapangan dilakukan dengan cara mengamati, merekam, dan mencatat untuk mendapatkan informasi sumberdaya gunungapi yang akan dituangkan kedalam atlas. Beberapa informasi yang tidak diperoleh dari survei lapangan akan dilengkapi menggunakan data sekunder seperti data dari PVMBG, citra satelit, dan website resmi pemerintah. FGD kali ini dilakukan juga untuk mendapatkan masukan dari narasumber bahwa selain menyajikan sumberdaya dari segi fisik juga perlu dilengkapi dengan kondisi sosial budaya. Dengan menampilkan informasi sosial budaya di daerah pegunungan, maka dapat dilihat bagaimana hubungan antara manusia dengan alam. Atlas merupakan media *storytelling* sehingga pengguna diharapkan bisa lebih memahami

informasi yang akan disampaikan dalam sebuah atlas. Dalam penyajian Atlas Bentang Sumberdaya Lahan Gunungapi akan ditonjolkan nuansa geospasial sebagai ciri produk atlas yang dihasilkan oleh Badan Informasi Geospasial yaitu terdapat rangkaian peta, citra, narasi, dan foto. *[Setiyani, 2020]*



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Gedung F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613
Fax - PPTRA : (021) 8764613
Email : redaksi.pttra@gmail.com
Twitter : @pptra_big
Instagram : @pptra_big
http://big.go.id/newsletter/



TATA RUANG & ATLAS NEWSLETTER

Media Informasi Pemetaan Tata Ruang, Dinamika Sumberdaya, dan Atlas

Catatan Beranda

Bismillahirrahmanirrahim. Edisi November kali ini kita mulai dengan kutipan dari bung Hatta: “Jatuh banggunya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntai pulau di peta.” Sementara kita pingirkan permasalahan pandemi Covid-19, dan renungkan pesan bung Hatta bahwa kita tidak ingin negeri ini sekedar nama dan gambar seuntai pulau di peta. Ayo, kita semua bangkit karena kemakmuran negeri ini sangat tergantung pada usaha kita semua. Ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri.



Supaya Peta dan Informasi Geospasial tidak hanya menggambarkan seuntai pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke seperti yang dikhawatirkan bung Hatta, maka sudah seharusnya peta harus dapat dimanfaatkan untuk mengisi kemerdekaan untuk menggapai persatuan, kepedulian dan kemakmuran bangsa Indonesia. Peta harus bermanfaat untuk kepentingan keseharian masyarakat, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan sampai

pemanfaatan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan Indonesia.

Perkembangan teknologi telah membawa fungsi Peta yang bisa langsung dirasakan semua lapisan masyarakat. Orang tidak hanya menggambar peta dari permukaan bumi pada bidang yang datar dalam skala tertentu. Namun peta dan informasi geospasial telah menjadi alat kemakmuran rakyat dalam bernavigasi di kehidupan sehari-hari. Kombinasi teknologi *Global Positioning System* (GPS) dan *smartphone*, menjadikan peta selalu dekat dengan penggunaannya. Hampir semua lokasi bisa digambarkan dalam peta: kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, tempat wisata, hotel, restoran, dan semuanya. Dengan memanfaatkan peta, tingkat kemakmuran rakyat bisa dirasakan secara signifikan: dapat mencari tempat yang diinginkan, menuju lokasi tanpa harus banyak bertanya pada orang-orang disepanjang perjalanan, memilih route perjalanan yang terpendek atau yang tercepat dan lain sebagainya, sehingga perjalanan dapat direncanakan dengan jauh lebih baik, waktu tempuh menjadi pendek/cepat dan murah.

Masyarakat penyandang disabilitas, khususnya tuna netra, di era millenium ini juga dapat memanfaatkan produk-produk peta taktual. Sejalan dengan semangat bahwa pembangunan nasional harus dapat dinikmati seluruh rakyat (*No One Left Behind*), maka Badan Informasi Geospasial juga

menerbitkan peta yang dikhususkan bagi para penyandang tunanetra. Peta khusus bagi para tunanetra itu disebut peta taktual yang dibuat pada lembaran kertas atau plastik dalam bentuk tiga dimensi. Peta taktual tersebut berisi informasi dasar wilayah administratif Indonesia yang keterangan isinya menggunakan huruf *braille*. Melalui peta taktual ini para penyandang tunanetra memperoleh hak yang sama dengan orang yang dapat melihat dalam mendapatkan informasi melalui peta.

Peta tidak hanya gambaran seuntai pulau, namun peta NKRI merupakan bagian dari fungsi peta untuk memastikan wilayah negara sebagai bagian informasi yang diperlukan untuk pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, dengan peta NKRI, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di dalam wilayah NKRI dapat diidentifikasi dan dapat ditindaklanjuti penanganannya. Konflik perbatasan antar negara diselesaikan dengan menggambarkan batas-batasnya di atas peta. Dengan kata lain, peta dapat dimanfaatkan untuk menjaga perdamaian dunia.

Peta juga memiliki peran sangat penting dalam perencanaan pembangunan Nasional, misalnya peta yang dituangkan dalam rencana tata ruang. Output perencanaan adalah sebuah rencana tata ruang yang akan dipakai sebagai referensi oleh para penggunanya, oleh karena itu peta yang akurat merupakan hal yang mutlak dalam perencanaan tata ruang. Agar rencana tata ruang dipatuhi oleh seluruh pihak yang terkait, sehingga memiliki dasar pijakan bertindak yang sama. Dalam pelaksanaan pembangunan, peta dituangkan dalam bentuk Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang. Pelaksanaan pembangunan harus diuji dengan peta rencana yang telah dibuat, sehingga tujuan untuk mendapatkan kemakmuran rakyat dapat dicapai.

Badan Informasi Geospasial merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mendapatkan tugas untuk menyelenggarakan informasi geospasial dasar, membina penyelenggaraan informasi geospasial tematik dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur informasi geospasial diharapkan dapat merealisasikan peta dan informasi geospasial beserta pemanfaatannya, sehingga peta tidak hanya dimengerti sebagai gambaran seuntai pulau saja.

Akhirnya, beranda ini kita tutup dengan semangat para Pahlawan kita seperti kata bung Hatta: “Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat.” Mari kita sediakan peta untuk mengisi kemerdekaan dalam menggapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. *[Dr. -Ing. Khafid, 2020]*

REDAKSI:

| **Penanggung Jawab** : Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | **Tim Redaksi**: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |
| **Editor**: Prita Brada Bumi, Sri Eka Wati, Chintia Dewi, Izzuddin Abdul Aziz |
| **Desain Tata Letak**: Gin Gin Gustiar |

FGD Atlas Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

FGD ke-tiga Atlas Indikator Tujuan Pembangunan ini diselenggarakan pada 2 November 2020 bertempat di hotel Renotel Sentul Bogor, dilaksanakan secara tatap muka dan daring. FGD dibuka oleh Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Dr.-Ing. Khafid dengan moderator Koordinator Atlas Dra. Niendyawati, M.Sc. Mengundang narasumber dari Sekretariat SDGs Indonesia yaitu Sanjoyo, Indriana Nugraheni, Gantjang Amannullah, serta dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik, Ofi Ana Sari. FGD juga dihadiri oleh seluruh staf Kelompok Kerja Atlas dan pelaksana kegiatan PT. Metro Network Solutions.

Banyak masukan yang disampaikan oleh para narasumber, salah satunya adalah tentang gradasi warna yang menunjukkan klasifikasi nilai indikator TPB. Penentuan gradasi warna harus dilakukan dengan cermat yaitu dengan memperhatikan judul/tema dan target setiap indikator TPB, karena warna akan membantu memudahkan identifikasi secara cepat oleh para pengambil kebijakan. Misalnya Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan untuk indikator 1.2.1. "Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut jenis kelamin dan kelompok umur" memakai gradasi warna merah. Semakin tinggi persentase kemiskinan pada suatu wilayah, ditunjukkan dengan warna semakin merah tua. Hal ini dimaksudkan agar peta ini mudah dibaca oleh para pengambil kebijakan. Wilayah dengan warna merah tua (paling gelap) merupakan wilayah paling tinggi angka kemiskinannya sehingga memerlukan perhatian atau intervensi lebih dibanding wilayah lain yang mempunyai warna lebih muda. Dengan kata lain wilayah dengan warna merah paling gelap memerlukan penanganan pemerintah berupa kebijakan tertentu dalam upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinannya.

Sebaliknya, Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak untuk indikator 6.2.1.b "Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak", semakin tinggi persentase semakin muda gradasi warna birunya, sedangkan semakin rendah persentase semakin ke arah biru gelap. Persentase tinggi yang mendekati 100% ditunjukkan dengan warna biru muda, yang berarti semakin banyak rumah tangga yang memiliki akses layanan sanitasi layak. Sedangkan warna biru tua menunjukkan indikator dengan persentase capaian paling rendah atau masih jauh dari akses layanan sanitasi layak. Melalui gradasi warna ini, para pengambil kebijakan dapat lebih mudah melihat wilayah-wilayah

mana yang memerlukan intervensi untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak.

Untuk menghasilkan aturan atau standar gradasi warna indikator TPB, diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan Sekretariat SDGs Indonesia, BPS dan Kementerian/Lembaga yang menghasilkan data TPB, sehingga didapatkan standar warna yang disepakati bersama. [Prita Brada Bumi, 2020]



Peta Indikator 1.2.1



Peta Indikator 6.2.1.b

Pengembangan Aplikasi E-Atlas Nasional versi 3.0

Pada tanggal 4 Desember 2020, berkolaborasi dengan Tim dari Universitas Ibnu Khaldun, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas melaksanakan FGD Finalisasi Prototipe pengembangan Aplikasi E-Atlas Nasional versi 3.0 untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan mengikuti perkembangan teknologi. Aplikasi E-Atlas Nasional pertama kali dibuat pada tahun 2016, dan dikembangkan ke versi 2.0 pada tahun 2017 yang sampai saat ini bisa diakses melalui tautan atlas.big.go.id. pada pengembangan ke versi 3.0 tim mempertimbangkan banyak faktor seperti kaidah kartografi, bersifat interaktif, hubungan antar jenis data/media, performa tinggi, *easy to use*, *user Interface* yang lebih menarik, fungsi yang handal (*reliability*), mampu berinteraksi dengan aplikasi lain (*interoperability*), dan dapat diakses pada berbagai ukuran layar, system operasi pengguna, dan *mobility device*.

E-Atlas Nasional versi 3.0 disajikan dengan konsep kemudahan pencarian berdasarkan wilayah, tematik dan kata obyek khusus. Dengan penyajian secara naratif dilengkapi peta, citra satelit, foto, video dan infografis lainnya sehingga pengguna dapat memilih lebih detail sesuai kebutuhan bahkan dapat mengunduh Peta tematik atau Buku Atlas yang dibutuhkan. Kehadiran aplikasi ini diharapkan lebih dari sekedar memberikan informasi, namun juga menjadi media diseminasi wawasan kebangsaan dan media penyebaran data geospasial berbagai tema kepada institusi pemerintah, swasta, dunia pendidikan, dan masyarakat. [Satrio Jati Kinantyo Widhi, 2020]

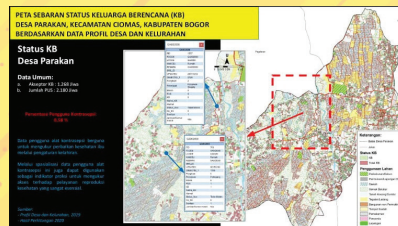


Perjanjian Kerja Sama BKKBN dan BIG

Kamis, 12 November 2020 merupakan hari yang bersejarah untuk Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) karena pada tanggal tersebut telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh Pimpinan Eselon 1 di masing-masing Lembaga. Perjanjian Kerjasama ini merupakan bentuk keseriusan BIG dengan menggandeng BKKBN untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan Pemetaan Integrasi Spasial Statistik.

Tahun 2021, BKKBN akan memiliki program Pendataan Keluarga 2021 (PK2021) yang akan dilaksanakan secara Nasional. Pendataan Keluarga 2021 ini diharapkan akan mewujudkan "Satu Data Keluarga Indonesia" dengan parameter utama berdasarkan *by name by address*. Tingkat kedalaman data ini yang menjadi menarik untuk dapat dijadikan sebagai input data dalam integrasi spasial statistik. Dengan integrasi spasial statistik, data yang diperoleh dari Pendataan Keluarga 2021 dapat diaplikasikan untuk menjawab Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDG's) hingga ke level terkecil. Hal ini tentunya dapat bermanfaat bagi pemangku kebijakan untuk menentukan kebijakan pembangunan di daerahnya hingga ke level terkecil pula sehingga kedepan penerapan kebijakan akan lebih tepat sasaran.

Dalam program Pendataan Keluarga 2021 terdapat beberapa parameter data yang dapat dijadikan unsur dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), diantaranya terkait dengan Kemiskinan, keterjangkauan fasilitas umum, dan persentase pengguna alat kontrasepsi/ pelaku KB. Melalui data yang diperoleh dari BKKBN, kegiatan integrasi spasial statistik akan dilakukan secara bertahap dengan melihat kondisi dan kesiapan data yang ada. Kedepan, akan terbentuk sistem integrasi spasial statistik yang lebih baik dan dapat diaplikasikan dalam semua kondisi. [Gin Gin Gustiar, 2020]



Diskusi Teknis Penyusunan Sistem Informasi Pemeriksaan Peta Rencana Tata Ruang

Salah satu masalah dalam pembinaan pengawalan penyusunan Peta Rencana Tata Ruang (RTR) adalah sebagian besar pemerintah daerah tentunya berada jauh dari pusat pemerintahan tempat BIG berada, sehingga faktor jarak, waktu, dan biaya menjadi salah satu kendala dalam penyusunan dan pembinaan peta RTR tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, BIG mengeluarkan beberapa inovasi untuk mempersingkat proses pembinaan tersebut, beberapa di antaranya yang telah dilakukan adalah pelaksanaan asistensi secara *online* melalui aplikasi khusus yang dapat melakukan unggah dan unduh data guna pemeriksaan Peta RTR secara jarak jauh.

BIG hendak membangun sebuah sistem khusus yang memungkinkan untuk dilakukannya integrasi terhadap sistem yang sudah ada, di mana diharapkan bisa melakukan unggah dan unduh data, serta data peta (informasi geospasial) tersebut dapat muncul dan dilakukan pemeriksaan langsung secara *online* via web browser, tanpa menggunakan aplikasi desktop komputer. Dalam artian pemeriksaan data dan peta secara langsung melalui *cloud based computing* dengan data-data peta tersimpan rapi pada server sentral.

Selain itu diharapkan adanya juga otomatisasi pemeriksaan peta untuk hal-hal yang tidak memerlukan pemeriksaan secara visual, misal penamaan file, ketentuan kolom atribut, isian klasifikasi atribut peta, pemeriksaan untuk hal-hal seperti ini dapat dibantu secara otomatisasi.

Untuk itu guna mendukung kegiatan penyusunan aplikasi tersebut pada tahun depan, saat ini Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (Pusat PTR) BIG mengadakan pembelian/ *renewal* perangkat lunak GIS Server dan pembelian perangkat lunak *Production Mapping Server*, yang di dalamnya memuat *Data Reviewer Server* dan *Workflow*

Manager Server. Kedua perangkat lunak ini dibutuhkan dalam kaitannya untuk membangun aplikasi Sistem Informasi Pemeriksaan Peta Rencana Tata Ruang yang akan disusun pada tahun 2021.

Untuk hal ini dilakukan diskusi dan pembahasan bersama Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (Pusat PPIG) dan pihak ESRI Indonesia mengenai pemasangan perangkat lunak, dan pembahasan teknis penggunaan dua perangkat lunak tersebut kaitannya dengan penyusunan Sistem Informasi Pemeriksaan Peta Rencana Tata Ruang di tahun depan. Diskusi bersama ini diperlukan supaya sistem yang dibangun tahun depan tidak mengalami banyak kendala dan lebih matang secara teknis maupun fitur. [Marhensa Aditya Hadi, 2020]



Rapat Pleno

Kelompok Kerja Integrasi Informasi Geospasial dan Statistik,

United Nations Global Geospatial Information Management – Asia Pasific (UN-GGIM-AP)

Pada tanggal 3 - 5 November 2020, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan *9th Plenary Meeting United Nations Global Geospatial Information Management – Asia Pasific (UN-GGIM-AP)*. Acara yang sedianya akan dilaksanakan di Bali dirubah menjadi pertemuan virtual mengingat pandemi Covid-19 yang belum usai.

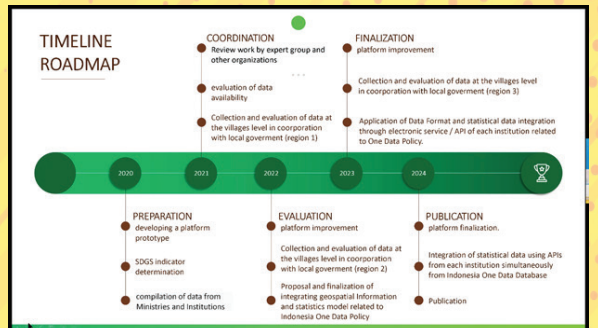
Pertemuan kali ini membahas tiga agenda penting, yaitu kerangka referensi geodetik, manajemen lahan dan kadaster, dan integrasi informasi geospasial dengan statistik yang dilakukan secara paralel pada kelompok kerja masing-masing. Sedikitnya 175 peserta dari 25 negara tercatat mengikuti kegiatan ini

Pada kesempatan ini, Presiden UN-GGIM-AP Alison Rose menyampaikan bahwa sebagai perwakilan dari *National Geospatial Information Authority* 56 negara di kawasan Asia dan Pasifik, UN-GGIM-AP bertujuan untuk mempromosikan penggunaan informasi geospasial untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. "Informasi geospasial dapat dimaksimalkan pemanfaatannya untuk bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Informasi geospasial akan dimaksimalkan di kawasan Asia dan Pasifik," jelas Alison.

Pada sidang paralel Kelompok Kerja 3, Integrasi Informasi Geospasial dan Statistik, Antonius Wijanarto sebagai ketua menyambut nominasi Korea Selatan sebagai wakil Ketua Kelompok Kerja Integrasi Informasi Geospasial dan Statistik. Pada kesempatan ini Indonesia, Korea Selatan dan Jepang menyampaikan laporan tentang kemajuan pelaksanaan integrasi informasi geospasial dan statistik di negaranya. ESCAP sebagai sekretariat UN-GGIM-AP juga menyampaikan kemajuan integrasi informasi geospasial dan statistik di Asia Pasifik dan mempromosikan Kerangka berbagi pakai Informasi Geospasial di Asia Pasifik.

Rapat ini menghasilkan beberapa point antara lain :

- Menyadari pentingnya integrasi informasi geospasial dan statistik dalam mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 di seluruh kawasan Asia-Pasifik.
- Mengadopsi *Integrated Geospatial Information Framework* (IGIF) dan *the Global Statistic Geospatial Framework* (GSGF) untuk mendukung integrasi informasi geospasial dan statistik.
- Mendukung panduan pelaksanaan dan pengembangan kapasitas yang diperlukan untuk mendukung *Integrated Geospatial Information Framework* (IGIF) dan *the Global Statistic Geospatial Framework* (GSGF) di tingkat negara.



Webinar “Big Data, What and For What” oleh BKKBN

Webinar “*Big Data, What and For What*” diselenggarakan pada tanggal 22 November 2020 dan dibuka oleh kepala BKKBN. Dalam Pembukaan dan Paparan oleh Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG menyampaikan bahwa “data merupakan suatu pelita utama untuk melihat fakta dan fenomena” BKKBN harus mampu mendiagnosis permasalahan keluarga termasuk penyebabnya, tanpa diagnosis yang benar maka semua program dapat salah sasaran dan hanya menghambur-hamburkan dana. Untuk menjalankan program dengan benar semua hal tersebut diawali dengan data yang berkualitas. Dengan adanya data yang berkualitas dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk perencanaan, pembuatan keputusan, evaluasi, serta memformulasikan kebijakan agar sasaran tercapai. BKKBN tahun 2021 akan menyelenggarakan Pendataan Keluarga 2021 dimana hasil dari kegiatan ini akan menghasilkan data kependudukan yang cukup besar dan lengkap. Harapannya dengan adanya data tersebut juga akan dibarengi dengan Standar Pemanfaatan *BIG Data* dalam kerangka pengambilan kebijakan pemerintah. Diakhir paparannya Kepala BKKBN menyampaikan nantinya di BKKBN harus ada *Grand Design BIG Data* Keluarga dengan semangat *One and Single Website* dimana dalam prakteknya aka nada *Chief Data (digital) Officer* untuk mendampingi Kepala Daerah dalam membaca data dan mengusulkan program.

Acara Kemudian dilanjutkan oleh pemaparan dari narasumber yang di moderator oleh Deputy Pengendalian Penduduk Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc., Dip. Com. Paparan Pertama disampaikan oleh Deputy Bidang Statistik Sosial BPS dengan judul Bonus Demografi, *Big Data* dan Indonesia Emas. Bonus Demografi I di Indonesia terbuka sejak tahun 2012 dan tertutup pada tahun 2037 dan pada tahun 2045 Indonesia diprediksikan mengalami Bonus Demografi II dimana ditunjukkan dengan meningkatnya *asset* yang dimiliki oleh penduduk usia kerja. Peluang tersebut dapat ditangkap dengan baik jika dibarengi oleh kebijakan pemerintah yang sejalan. Dengan pemanfaatan Big Data diharapkan mampu memilih kebijakan yang tepat sasaran.

Paparan Kedua disampaikan oleh Prof. Riwanto Tito Sudarmo tentang Demografi, Demokrasi, Disrupsi. Dalam kesimpulannya Prof. Riwanto menyampaikan secara teoritis kuantitas dan kualitas kependudukan bisa dikendalikan melalui berbagai kebijakan kependudukan, *Big Data* menjadi imperative untuk memproyeksi dan merencanakan masa depan. Namun dalam prakteknya mengendalikan dinamika kependudukan tidak mudah, dan akan semakin sulit karena adanya hal-hal yang tidak bisa diprediksi dari elemen demokrasi dan disrupsi.

Paparan Ketiga disampaikan oleh M. Kahirul Imam Dosen Fakultas Ilmu Sosial UI. Dalam paparannya Kahirul Imam menjelaskan terkait sejarah, keunggulan dan kelemahan *Big Data* serta kemudahannya dalam pemetaan terkait statistic di-era *Big Data*.

Paparan Keempat disampaikan oleh Dr. Ir. I Gede Suratha, MMA Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri. Pak Suratha menyampaikan bahwa Kemendagri, lebih khusus Ditjen Dukcapil siap mendukung implementasi Satu Data dalam skema *Big Data* dimana diperlukan data kependudukan yang dapat di integrasikan untuk berbagai hal terutama dala konteks pembangunan oleh pemerintah Indonesia. Melalui NIK yang telah terintegrasi dapat mempermudah dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh berbagai K/L dan pemerintah daerah. Hal ini tentunya dibarengi dengan etika dan protokol yang ketat mengingat data tersebut merupakan data yang bersifat pribadi dan sensitif.

Dengan adanya skema *Big Data* serta aplikasi-aplikasi yang sudah berbasis *Artificial Intelligence/ Machine Learning* proses perencanaan seharusnya akan lebih mudah. Dengan adanya *machine learning* dan *Big Data* semua informasi dapat memberikan data lokasi sehingga pada proses pemetaan juga akan mengalami banyak kemudahan. Format lokasi tidak melulu harus angka koordinat rapi dan seragam, melainkan bisa berupa teks maupun deskripsi tempat. Namun saat ini belum ada aturan dan dasar pemanfaatan *Big Data* dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Melalui webinar ini tentunya Badan Informasi Geospasial dapat mengambil peran dalam pemetaan sosial kependudukan dengan memanfaatkan skema *Big Data*. Langkah awal adalah dengan menyiapkan dasar aturan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pemanfaatan *Big Data* Kependudukan untuk Pemetaan Sosial Kependudukan. [Noor Adhi Sakti, 2020]



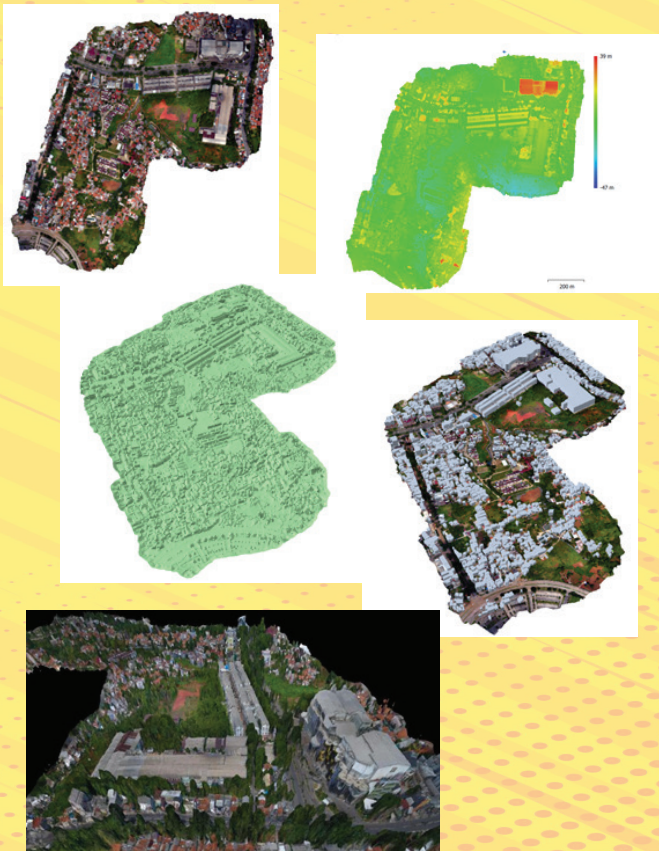
Pemanfaatan Drone dalam Tata Ruang

Teknologi drone atau yang biasa juga dikenal sebagai UAV beberapa tahun terakhir banyak diperbincangkan diberbagai sektor. Tak terkecuali dalam bidang penataan ruang. Sebagaimana tercantum dalam **Permen ATR/Ka BPN RI No. 17/2017** tentang Pedoman Audit Tata Ruang, drone merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam audit tata ruang. Audit tata ruang ini mencakup serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang.

Berbekal ilmu yang diperoleh saat Pelatihan *Basic Aerial Mapping* dan *Aerial Photography/Videography* pada tanggal 19-20 Oktober 2020, Kelompok Kerja Pembinaan Pemetaan Tata Ruang, PPTRA BIG melakukan uji coba pemetaan dengan menggunakan drone untuk audit tata ruang. Uji coba dilaksanakan selama 4 hari, yaitu mulai tanggal 10 hingga 13 November 2020, dengan memotret sekitar Kawasan Cibinong City Mall hingga Stadion Pakansari menggunakan wahana DJI Phantom 4 dan aplikasi *Drone Deploy*. Area seluas kurang lebih 1,04 km² ini dipotret pada ketinggian 100 meter dengan *front overlap* 80% dan *side overlap* 70%, serta menghasilkan resolusi orthophoto sebesar 4,18 cm dan resolusi DSM sebesar 33,4 cm.

Hasil pemetaan drone yang berupa orthophoto dan DSM beserta turunannya (DTM), selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai data pendukung untuk mengetahui indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang. Beberapa diantaranya digunakan dalam analisis Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH).

Bahkan dalam **UU No. 11 Tahun 2020** tentang Cipta Kerja yang baru saja disahkan menyebutkan bahwa fungsi bangunan harus tercantum dalam RDTR. Sehingga kebutuhan terhadap data geospasial 3 Dimensi (3D) mutlak diperlukan untuk mendapatkan informasi fungsi bangunan secara spasial. Dan, salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah pemetaan dengan drone. [Irham Habib Anggara, 2020]



Pleno Bantuan Teknis Peta RTR 2020

Tahun 2020, Pusat PTRA terdpat kegiatan Penyusunan Peta Tata Ruang Terekomendasi yaitu kegiatan bantuan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyusunan peta rencana tata ruang, baik RTRW maupun RDTR. Bantuan ini fokus kepada membantu pemerintah daerah dalam membantu menyelesaikan peta dasar, peta tematik, serta membantu memperbaiki peta rencana dalam hal geometris perpetaan dan kesesuaiannya databasanya. Kegiatan Penyusunan Peta Tata Ruang Terekomendasi terdapat dua paket, yaitu Paket 1 untuk 30 RTRW dan Paket 2 untuk 80 RDTR. Diharapkan semua peta RTR yang masuk dalam kegiatan tersebut, semuanya dapat diselesaikan dan mengikuti Pembahasan Akhir (Pleno) peta RTR untuk mendapatkan surat rekomendasi dari BIG.

Rapat pembahasan akhir dari BIG khusus untuk kegiatan tersebut, telah dimulai yang pertama pada bulan Oktober 2020, dan selanjutnya pada bulan November dan Desember 2020. Karena masih dalam masa Pandemi Covid19, maka semua rapat pleno tersebut dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi *video conference*. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir pertemuan-pertemuan secara tatap muka langsung.

Rapat pembahasan akhir Peta RTR Terekomendasi tahun 2020 yang pertama dilaksanakan pada tanggal 26-27 Oktober 2020 dengan peserta sebanyak 12 Kabupaten/ Kota untuk Peta RTRW dan 14 BWP untuk Peta RDTR. 12 Kabupaten/ Kota tersebut antara lain RTRW Kabupaten Deli Serdang, RTRW Kabupaten Mimika, RTRW Kabupaten Rokan Hilir, RTRW Kota Pematangsiantar, RTRW Kabupaten Sumba Barat, RTRW Kabupaten Pasaman Barat, RTRW Kabupaten Malinau, RTRW Kabupaten Pohnuato, RTRW Kabupaten Lombok Barat, RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas, RTRW Kabupaten Bolaangmongondow, dan RTRW Kabupaten Mukomuko. Untuk 14 BWP Peta RDTR diantaranya adalah RDTR BWP Beteleme, Kabupaten Morowali Utara; RDTR BWP Payung Sekaki, BWP Tampan, dan BWP Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru; RDTR BWP Belimbing, Kabupaten Muara Enim; RDTR BWP Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar; RDTR BWP Amlapura, Kabupaten Karangasem; RDTR BWP Kelam Permai, Kabupaten Sintang; RDTR BWP Bangko, Kabupaten Merangin; RDTR BWP Rantepao, Kabupaten Toraja Utara; RDTR BWP Kopo Jawilan dan BWP Kibin Cikande, Kabupaten Serang; RDTR BWP Cisaga, Kabupaten Ciamis; dan RDTR BWP Senduro, Kabupaten Lumajang.

Rapat pembahasan akhir Peta RTR Terekomendasi yang kedua dilaksanakan pada tanggal 16-17 November 2020 dengan peserta 10 RTRW dan 18 RDTR. 10 RTRW tersebut diantaranya RTRW Kabupaten Lombok Tengah, RTRW Kota Baubau, RTRW Kabupaten Sorong Selatan, RTRW Kota Singkawang, RTRW Kabupaten Bantaeng, RTRW Kabupaten Tabalong, RTRW Kota Bandung, RTRW Kabupaten Kotabaru, RTRW Kabupaten Pasuruan, dan RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk 18 lokasi RDTR diantaranya RDTR BWP Wlingi dan BWP Srengat, Kabupaten Blitar; RDTR BWP Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya; RDTR BWP Campaka, Kabupaten Cianjur; RDTR BWP Gantung, Kabupaten Belitung Timur; RDTR BWP

Prajejan, BWP Klabang, dan BWP Tapen, Kabupaten Bondowoso; RDTR BWP Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo; RDTR BWP Pallatae, Kabupaten Bone; RDTR BWP Buah Dua, Kabupaten Sumedang; RDTR BWP Malangke, Kabupaten Luwu Utara; RDTR BWP Kota Cimahi, Kota Cimahi; RDTR BWP Batu Sopang, Kabupaten Paser; RDTR BWP Klakah, Kabupaten Lumajang; RDTR BWP Nusa Penida, Kabupaten Klungkung; RDTR BWP Wungu, Kabupaten Madiun; dan RDTR BWP Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.

Rapat pembahasan akhir Peta RTR Terekomendasi yang ketiga atau yang terakhir dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada tanggal 1-3 Desember 2020, meliputi 7 RTRW dan 29 RDTR. 7 lokasi RTRW diantaranya RTRW Kota Bekasi, RTRW Kota Medan, RTRW Kabupaten Pasuruan, RTRW Kabupaten Buton, RTRW Kabupaten Bone, RTRW Kabupaten Bungo, dan RTRW Kabupaten Bantul. Selanjutnya untuk 29 lokasi RDTR antara lain RDTR BWP Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; RDTR BWP Curug, BWP Kasemen, dan BWP Walantaka, Kota Serang; RDTR BWP Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat; RDTR BWP Matani-Kekaskasen, Kota Tomohon; RDTR BWP Balige, Kabupaten Toba Samosir, RDTR BWP Pamarican, BWP Cimaragas, dan BWP Lakkok, Kabupaten Ciamis; RDTR BWP Lawang Kidul dan BWP Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim; RDTR BWP Dompur, Kabupaten Dompur; RDTR BWP Tiakur dan BWP Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya; RDTR BWP Sumber, Kabupaten Cirebon; RDTR BWP Tuban, Kabupaten Tuban; RDTR BWP Garum, Kabupaten Blitar; RDTR BWP Kokap, Kabupaten Kulon Progo; RDTR BWP Purworejo-Kutoarjo, Kabupaten Purworejo; RDTR BWP Sokaraja, Kabupaten Banyumas; RDTR BWP Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman; RDTR BWP Cianjur, Kabupaten Cianjur; RDTR BWP Sungai Manau dan BWP Pamenang, Kabupaten Merangin; RDTR BWP Tebo Ilir, Kabupaten Tebo; RDTR BWP Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan; dan RDTR BWP Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

Total dari semua Peta RTR yang mengikuti pembahasan akhir Peta RTR Terekomendasi tahun 2020 adalah 29 Kabupaten/ Kota untuk Peta RTRW dan sebanyak 61 lokasi BWP untuk Peta RDTR. Semua Peta RTR tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari BIG walaupun terdapat beberapa catatan yang harus lengkapi sebelum surat rekomendasi tersebut diserahkan. [Devita Remala Sari, 2020]



Wajah Baru Kawasan Senen

Senen merupakan salah satu kawasan perdagangan dan simpul transportasi di ibu kota Jakarta. Sejak 285 tahun silam dengan adanya Pasar Senen, kawasan perdagangan ini membuktikan eksistensinya. Ditambah dengan adanya stasiun Pasar Senen yang berdiri sejak 1887 menambah geliat ekonomi di kawasan ini. Seiring zaman berganti, permasalahan perkotaan pun tak lepas dari kawasan ini. Mulai dari permasalahan persaingan usaha, permukiman kumuh, pencemaran lingkungan, kemacetan, hingga permasalahan kriminal, melekat di dalamnya.

Strategisnya peran kawasan ini, membuat pemerintah terus berupaya untuk mengurai berbagai permasalahan yang dihadapi. Dari masa ke masa pemerintahan berganti kawasan Senen terus berbenah hingga menunjukkan perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kini Senen telah memiliki wajah baru yang lebih segar. Penataan kawasan melalui konsep revitalisasi telah dilakukan terhadap berbagai prasarana dan sarana yang ada. Terminal, halte, jembatan penyebarangan orang (JPO), jalur pejalan kaki telah diperbaiki sedemikian rupa untuk memudahkan pengguna transportasi melakukan perpindahan antar moda. Plaza dan taman pun turut disediakan sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang sedang berada di kawasan ini.

Berbagai perubahan yang meningkatkan nilai manfaat tersebut tentunya membutuhkan peran masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga kawasan ini agar tetap dapat menjadi kawasan publik yang nyaman dan aman. [Rochmad Budi Santoso, 2020]

